

Jalan Tol Jadi Prioritas

Pembangunan Sumatra menapaki babak baru. Lampung akan menjadi pintu gerbang.

AHMAD NOVRIWAN

TADI malam, tujuh dari 10 gubernur se-Sumatra sudah tiba di Kota Bandar Lampung. Kehadiran mereka tidak lain untuk mematangkan kembali Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor Sumatra.

Optimisme dipacak para gubernur, khususnya sang tuan rumah Gubernur Lampung Sjachroedin Zainal Pagaralam. "Rapat koordinasi ini akan menjadi salah satu ajang pengusulan program pembangunan di Sumatra kepada pemerintah pusat," tutur Sjachroedin.

Acara akan dibuka hari ini (Rabu, 20/3). Selain gubernur se-Sumatra, ada juga Gubernur Banten yang diharapkan ikut berurusan rembuk. Dari jajaran pemerintah pusat, direncanakan ada sejumlah menteri yang akan hadir, di antaranya Men-

ko Perekonomian Hatta Rajasa, Kepala Bappenas/Menteri PPN Armida Alisjahbana, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Beberapa program akan dibahas, mulai dari prospek dan percepatan pembangunan Institut Teknologi Sumatra hingga percepatan pembangunan Trans-Sumatra Railways. Ada juga soal bandara dan pelabuhan hingga pembangunan jalan tol, jalan arteri, jalan strategis nasional, dan sumber daya air. Tidak ketinggalan, rakor juga akan membahas program pembangunan Jembatan Selat Sunda.

Seperti diungkapkan Sjachroedin, para gubernur se-Sumatra sudah sepakat hendak mende-

sak pemerintah pusat merealisasikan pembangunan jalan tol Sumatra. "Sangat penting karena tol akan membuka akses bisnis di sejumlah daerah, yang selama ini masih terisolasi, tersebut kurangnya daya dukung infrastruktur jalan."

Dukungan gubernur

Para gubernur, lanjut dia, menyadari soal dana memang menjadi kendala pembangunan jalan tol. Namun, mereka yakin bahwa secara ekonomi, jalan tol sudah sangat layak dibangun dari Lampung hingga Aceh.

Proyek itu sendiri akan disingkirkan dengan pembangunan Jembatan Selat Sunda serta jalur rel kereta api ganda, juga dari Lampung hingga Aceh.

"Kami akan melibatkan pihak ketiga. Setiap gubernur akan menandatangani nota kesepahaman dengan investor di wilayah masing-masing," tandas Sjachroedin.

Lampung yang berfungsi sebagai pintu gerbang masuk ke Pulau Sumatra juga perlu diprioritaskan. "Sebelum pembangunan fisik, berbagai kajian

dilakukan Tim Teknis Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Provinsi Lampung. Kajian ini ditargetkan selesai dalam satu tahun," tambahnya.

Dukungan pembangunan jalan tol di Sumatra juga datang dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Menurut dia, percepatan pembangunan di Sumatra bisa terealisasi jika pemerintah daerah aktif bekerja. Di antaranya adalah mempermudah perizinan hingga analisis mengenai dampak lingkungan.

"Selain itu, mereka juga harus menyediakan cadangan kawasan ekonomi, pembebasan lahan, hingga setoran penyerahan saham dalam konsorsium. Saya sepakat jalan tol Sumatra perlu dipercepat pembangunannya," tegas Dahlan, beberapa waktu lalu.

Ia menyadari secara finansial, pengoperasian jalan tol Sumatra belum layak. Namun, kebutuhan dan dimensi ekonomis keberadaan jalan tol sudah sangat mendesak. (N-2)

novriwan
@mediaindonesia.com